



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan sebelum ditetapkan menjadi Perkada oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah...../4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri...../5

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);
30. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 33);
31. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 4.318.215.566.177,00 berkurang sebesar (Rp131.856.009.848,30) sehingga menjadi Rp 4.186.359.556.328,70, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula	Rp	536.032.229.926,00
2) Bertambah	Rp	52.219.830.083,70
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	588.252.060.009,70
 - b. Pendapatan Transfer;

1) Semula	Rp	2.704.261.413.000,00
2) Bertambah	Rp	54.990.366.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	2.759.251.779.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

1) Semula	Rp	1.077.921.923.251,00
2) Berkurang	Rp	239.066.205.932,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	838.855.717.319,00
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, dan Pasal 2F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp 536.032.229.926,00 bertambah sebesar Rp 52.219.830.083,70 sehingga menjadi Rp 588.252.060.009,70, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	528.451.996.209,00
2) Bertambah	Rp	39.208.320.082,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	567.660.316.291,00
 - b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	2.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	2.000.000,00

c. Lain-lain...../7

- c. Lain-lain PAD Yang Sah.
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 7.578.233.717,00 |
| 2) Bertambah/
Berkurang | Rp | 13.013.510.001,70 |
| Jumlah Lain-lain PAD
Yang Sah Setelah
Perubahan | Rp | 20.591.743.718,70 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp 2.704.261.413.000,00 bertambah sebesar Rp 54.990.366.000,00 sehingga menjadi Rp 2.759.251.779.000,00, terdiri dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- | | | |
|--|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.704.261.413.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 54.990.366.000,00 |
| Jumlah Pendapatan
Transfer Pemerintah
Pusat Setelah
Perubahan | Rp | 2.759.251.779.000,00 |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- | | | |
|---|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/
Berkurang | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan
Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp1.077.921.923.251,00 berkurang sebesar (Rp239.066.205.932,00) sehingga menjadi Rp838.855.717.319,00, yaitu Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.077.921.923.251,00 |
| 2) Berkurang | Rp | 239.066.205.932,00 |
| Jumlah Pendapatan
Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan | Rp | 838.855.717.319,00 |

Pasal 2B

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp4.820.033.558.744,00 berkurang sebesar (Rp18.123.920.378,69) menjadi sebesar Rp4.801.909.638.365,31, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- | | | |
|---|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.482.168.966.591,00 |
| 2) Bertambah | Rp | 467.630.652.829,70 |
| Jumlah Belanja Operasi
Setelah Perubahan | Rp | 2.949.799.619.420,70 |
- b. Belanja Modal;
- | | | |
|---|----|----------------------|
| Semula | Rp | 1.802.152.737.224,00 |
| Berkurang | Rp | 410.213.025.694,00 |
| Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan | Rp | 1.391.939.711.530,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga;
- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 153.211.401.623,00 |
| 2) Berkurang | Rp | 94.209.546.494,39 |
| Jumlah Belanja Tidak
Terduga Setelah Perubahan | Rp | 59.001.855.128,61 |

d. Belanja...../8

d. Belanja Transfer.		
1) Semula	Rp	382.500.453.306,00
2) Bertambah	Rp	18.667.998.980,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	401.168.452.286,00
Setelah Perubahan		

Pasal 2C

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp2.482.168.966.591,00 bertambah sebesar Rp467.630.652.829,70 menjadi sebesar Rp2.949.799.619.420,70, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;		
1) Semula	Rp	372.436.870.577,00
2) Berkurang	Rp	76.642.365.671,30
Jumlah Belanja Pegawai	Rp	295.794.504.905,70
Setelah Perubahan		
b. Belanja Barang dan Jasa;		
1) Semula	Rp	1.746.645.088.021,00
2) Bertambah	Rp	395.389.063.268,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Rp	2.142.034.151.289,00
Setelah Perubahan		
c. Belanja Bunga;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/ Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bunga	Rp	0,00
Setelah Perubahan		
d. Belanja Subsidi;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	787.181.115,00
Jumlah Belanja Subsidi	Rp	787.181.115,00
Setelah Perubahan		
e. Belanja Hibah;		
1) Semula	Rp	228.851.007.842,00
2) Bertambah	Rp	73.592.644.958,00
Jumlah Belanja Hibah	Rp	302.443.652.800,00
Setelah Perubahan		
f. Belanja Bantuan Sosial.		
1) Semula	Rp	134.236.000.151,00
2) Bertambah	Rp	74.504.129.160,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	Rp	208.740.129.311,00
Setelah Perubahan		

- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp1.802.152.737.224,00 berkurang sebesar (Rp410.213.025.694,00) menjadi sebesar Rp1.391.939.711.530,00, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;		
1) Semula	Rp	27.904.317.000,00
2) Bertambah	Rp	24.733.812.600,00
Jumlah Belanja Modal Tanah	Rp	52.638.129.600,00
Setelah Perubahan		
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
1) Semula	Rp	169.889.103.154,00
2) Bertambah	Rp	110.396.203.776,00

- | | | | |
|-----|---|-----------|--|
| | Jumlah Belanja Modal | Rp | 280.285.306.930,00 |
| | Peralatan dan Mesin | | |
| | Setelah Perubahan | | |
| c. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan; | | |
| | 1) Semula | Rp | 906.342.896.054,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | 639.939.530.286,00 |
| | Jumlah Belanja Modal | Rp | 266.403.365.768,00 |
| | Gedung dan Bangunan | | |
| | Setelah Perubahan | | |
| d. | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; | | |
| | 1) Semula | Rp | 693.419.421.016,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | 91.746.488.216,00 |
| | Jumlah Belanja Modal | Rp | 785.165.909.232,00 |
| | Jalan, Jaringan dan | | |
| | Irigasi Setelah Perubahan | | |
| e. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan | | |
| | 1) Semula | Rp | 950.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | 800.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja Modal | Rp | 1.750.000.000,00 |
| | Aset Tetap Lainnya | | |
| | Setelah Perubahan | | |
| f. | Belanja Modal Aset Lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp | 3.647.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | 2.050.000.000,00 |
| | Jumlah Belanja Modal | Rp | 5.697.000.000,00 |
| | Aset Lainnya Setelah | | |
| | Perubahan | | |
| (3) | Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp153.211.401.623,00 | berkurang | sebesar Rp94.209.546.494,39) |
| | | menjadi | sebesar Rp59.001.855.128,61, terdiri atas: |
| | 1) Semula | Rp | 153.211.401.623,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | 94.209.546.494,39 |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga | Rp | 59.001.855.128,61 |
| | Setelah Perubahan | | |
| (4) | Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp382.500.453.306,00 | | |
| | bertambah sebesar Rp18.667.998.980,00 | | |
| | menjadi sebesar Rp401.168.452.286,00, terdiri dari: | | |
| a. | Belanja Bagi Hasil; | | |
| | 1) Semula | Rp | 322.500.453.306,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | 18.667.998.980,00 |
| | Jumlah Belanja Bagi Hasil | Rp | 341.168.452.286,00 |
| | Setelah Perubahan | | |
| b. | Belanja Bantuan Keuangan. | | |
| | 1) Semula | Rp | 60.000.000.000,00 |
| | 2) Bertambah/ | Rp | 0,00 |
| | Berkurang | | |
| | Jumlah Belanja Bantuan | Rp | 60.000.000.000,00 |
| | Keuangan Setelah | | |
| | Perubahan | | |

Pasal 2D

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2F

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) semua sebesar Rp501.817.992.567,00 bertambah sebesar Rp113.732.089.469,61 menjadi sebesar Rp615.550.082.036,61, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp615.550.082.036,61.
 - (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak mengalami perubahan dengan jumlah sebesar Rp0,00.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan Yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
18. Lampiran XVIIa : Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta OPD Pemberi Bantuan Sosial;
19. Lampiran XVIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta OPD Pemberi Bantuan Sosial;
20. Lampiran XVIIIa : Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta OPD Pemberi Bantuan Sosial
21. Lampiran XVIIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta OPD Pemberi Bantuan Sosial;
22. Lampiran XIX : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta OPD Pemberi Hibah;
23. Lampiran XIXa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta OPD Pemberi Bantuan Keuangan;
24. Lampiran XIXb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta OPD Pemberi Bantuan Keuangan;

25. Lampiran XXa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
26. Lampiran XXb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
27. Lampiran XXc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung;
28. Lampiran XXI : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
29. Lampiran XXII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Provinsi, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
30. Lampiran XXIII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
31. Lampiran XXIV : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	536.032.229.926,00	588.252.060.009,70	52.219.830.083,70
4.1.01	Pajak Daerah	528.451.996.209,00	567.660.316.291,00	39.208.320.082,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.578.233.717,00	20.591.743.718,70	13.013.510.001,70
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.704.261.413.000,00	2.759.251.779.000,00	54.990.366.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.704.261.413.000,00	2.759.251.779.000,00	54.990.366.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.077.921.923.251,00	838.855.717.319,00	-239.066.205.932,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.077.921.923.251,00	838.855.717.319,00	-239.066.205.932,00
	Jumlah Pendapatan	4.318.215.566.177,00	4.186.359.556.328,70	-131.856.009.848,30
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.482.168.966.591,00	2.949.799.619.420,70	467.630.652.829,70
5.1.01	Belanja Pegawai	372.436.870.577,00	295.794.504.905,70	-76.642.365.671,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.746.645.088.021,00	2.142.034.151.289,00	395.389.063.268,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	787.181.115,00	787.181.115,00
5.1.05	Belanja Hibah	228.851.007.842,00	302.443.652.800,00	73.592.644.958,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	134.236.000.151,00	208.740.129.311,00	74.504.129.160,00
5.2	BELANJA MODAL	1.802.152.737.224,00	1.391.939.711.530,00	-410.213.025.694,00

5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.904.317.000,00	52.638.129.600,00	24.733.812.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.889.103.154,00	280.285.306.930,00	110.396.203.776,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	906.342.896.054,00	266.403.365.768,00	-639.939.530.286,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	693.419.421.016,00	785.165.909.232,00	91.746.488.216,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	950.000.000,00	1.750.000.000,00	800.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.647.000.000,00	5.697.000.000,00	2.050.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	153.211.401.623,00	59.001.855.128,61	-94.209.546.494,39
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	153.211.401.623,00	59.001.855.128,61	-94.209.546.494,39
5.4	BELANJA TRANSFER	382.500.453.306,00	401.168.452.286,00	18.667.998.980,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	322.500.453.306,00	341.168.452.286,00	18.667.998.980,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	4.820.033.558.744,00	4.783.241.639.385,31	-18.123.920.378,69
	Total Surplus/(Defisit)	-501.817.992.567,00	-615.550.082.036,61	-113.732.089.469,61
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	501.817.992.567,00	615.550.082.036,61	113.732.089.469,61
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH		PENDAPATAN		BELANJA										Jumlah Sebelum	Jumlah Setelah	Bertambah/ Berkurang
					OPERASI		MODAL		TIDAK TERDUGA		TRANSFER						
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	974.117.349.241,00	1.223.367.690.718,00	926.429.156.104,00	900.623.403.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.546.505.345,00	2.123.991.094.459,00	223.444.589.114,00	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	246.223.311.140,00	246.223.311.140,00	8.833.543.600,00	8.833.543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	1.02.2.14.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	236.153.086.040,00	255.830.362.954,00	8.833.543.600,00	9.430.797.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.986.629.640,00	265.261.160.890,00	20.274.531.250,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	196.167.807.747,00	267.702.080.136,00	274.124.679.621,00	290.928.496.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.292.487.368,00	558.630.576.141,00	88.338.088.773,00	
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	0,00	36.108.357.773,00	36.108.357.773,00	24.584.134.909,00	24.584.134.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	11	2.11.3.28.2.10.08.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

2	17	2.17.3.31.3.30.1 2.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	0,00	4.318.215.566.177, 00	0,00	4.186.359.556.328, 70	0,00	25.260.158.224, 00	44.035.187.316, 00	861.938.400, 00	1.184.267.150, 00	153.211.401.623, 00	0,00	382.500.453.306, 00	401.168.452.286, 00	905.847.671.884, 00	792.893.962.380,31	45.219.454.466, 00	19.097.357.842, 00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	4.318.215.566.177, 00	0,00	4.186.359.556.328, 70	0,00	364.045.430.813, 00	318.425.436.265, 70	6.090.386.142, 00	14.298.218.700, 00	153.211.401.623, 00	0,00	382.500.453.306, 00	401.168.452.286, 00	905.847.671.884, 00	792.893.962.380,31	-112.953.709.503, 69	
5	03		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00		0,00	0,00	0,00	22.746.209.984, 00	22.746.209.984, 00	1.735.521.942, 00	1.735.521.942, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	03	5.03.5.04.0.00.1 9.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00		0,00	0,00	0,00	7.621.338.500, 00	6.750.027.000, 00	0,00	52.000.000, 00	0,00	0,00	0,00	7.621.338.500, 00	6.802.027.000, 00	-819.311.500, 00	0,00	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00		0,00	0,00	0,00	192.450.419.438, 00	186.287.649.077, 00	27.591.896.815, 00	27.745.896.815, 00	0,00	0,00	0,00	220.042.316.253, 00	214.033.545.892, 00	-6.008.770.361, 00	0,00	
3	07		PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	105.260.655.315, 00	105.260.655.315, 00	19.477.942.457, 00	19.477.942.457, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	07	2.07.3.32.3.29.0 6.0000	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00		0,00	0,00	0,00	8.450.963.185, 00	90.872.361.180, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.963.185, 00	90.872.361.180, 00	82.421.397.995, 00	0,00	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00		0,00	0,00	0,00	484.647.209.284, 00	591.686.178.930, 00	558.539.006.900, 00	147.627.872.427, 00	0,00	0,00	0,00	1.043.186.216.184, 00	739.314.051.357, 00	-303.872.164.827, 00	0,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00		0,00	0,00	0,00	362.081.607.245, 00	362.081.607.245, 00	531.172.293.000, 00	531.172.293.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	01	4.01.0.00.0.00.1 5.0000	SEKRETARIAT DAERAH	0,00		0,00	0,00	0,00	362.081.607.245, 00	508.144.202.572, 00	531.172.293.000, 00	118.516.187.027, 00	0,00	0,00	0,00	893.253.900.245, 00	626.660.389.599, 00	-266.593.510.646, 00	0,00	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	4.318.215.566.177, 00	0,00	4.186.359.556.328, 70	0,00	364.045.430.813, 00	318.425.436.265, 70	6.090.386.142, 00	14.298.218.700, 00	153.211.401.623, 00	0,00	382.500.453.306, 00	401.168.452.286, 00	905.847.671.884, 00	792.893.962.380, 31	-112.953.709.503, 69	
5	02		KEUANGAN	0,00	4.318.215.566.177, 00	0,00	4.318.215.566.177, 00	0,00	305.834.139.028, 00	305.834.139.028, 00	3.609.407.200, 00	3.609.407.200, 00	153.211.401.623, 00	0,00	382.500.453.306, 00	382.500.453.306, 00	0,00	0,00	0,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.1 8.0002	UPT PENDAPATAN PAJAI	0,00		0,00	0,00	0,00	1.420.734.100, 00	1.470.734.100, 00	79.265.900, 00	79.265.900, 00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000, 00	1.550.000.000, 00	50.000.000, 00	0,00	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00		0,00	0,00	0,00	974.117.349.241, 00	1.223.367.690.718, 00	926.429.156.104, 00	900.623.403.741, 00	0,00	0,00	0,00	1.900.546.505.345, 00	2.123.991.094.459, 00	223.444.589.114, 00	0,00	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00		0,00	0,00	0,00	111.448.974.046, 00	111.448.974.046, 00	586.913.395.288, 00	586.913.395.288, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	03	1.03.1.04.0.00.0 3.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0,00	0,00	826.715.000,00	826.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.715.000,00	826.715.000,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	0,00	192.450.419.438,00	186.287.649.077,00	27.591.896.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.042.316.253,00	214.033.545.892,00	-6.008.770.361,00
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	0,00	74.665.860.207,00	74.665.860.207,00	38.251.222.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09	2.09.3.27.3.25.0 7.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	45.665.029.099,00	52.051.109.120,00	1.925.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.590.379.099,00	53.976.459.120,00	6.386.080.021,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	196.167.807.747,00	267.702.080.136,00	274.124.679.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.292.487.368,00	558.630.576.141,00	88.338.088.773,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0,00	0,00	9.713.321.480,00	9.713.321.480,00	163.725.132.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.1 0.0000	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	9.713.321.480,00	21.080.156.483,00	163.725.132.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.438.454.269,00	201.848.697.572,00	28.410.243.303,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	36.108.357.773,00	36.108.357.773,00	24.584.134.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.3.28.2.10.0 8.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	25.540.557.773,00	32.085.370.619,00	24.151.934.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.692.492.682,00	55.132.450.428,00	5.439.957.746,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	4.318.215.566.177,00	4.186.359.556.328,70	6.090.386.142,00	153.211.401.623,00	59.001.855.128,61	382.500.453.306,00	401.168.452.286,00	905.847.671.884,00	792.893.962.380,31	-112.953.709.503,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	35.465.081.801,00	35.465.081.801,00	745.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1 7.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.089.056.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	2.089.056.687,00	589.056.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	29.345.133.735,00	30.039.938.432,00	2.943.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288.522.135,00	33.151.046.832,00	862.524.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	29.345.133.735,00	29.345.133.735,00	2.943.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	6.01.0.00.0.00.2 0.0000	INSPEKTORAT	0,00	0,00	29.345.133.735,00	30.039.938.432,00	2.943.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288.522.135,00	33.151.046.832,00	862.524.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	196.167.807.747,00	267.702.080.136,00	274.124.679.621,00	290.928.496.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.292.487.368,00	558.630.576.141,00	88.338.088.773,00
2	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	246.223.311.140,00	246.223.311.140,00	8.833.543.600,00	8.833.543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	10.070.225.100,00	11.094.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070.225.100,00	11.094.838.900,00	1.024.613.800,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	0,00	192.450.419.438,00	186.287.649.077,00	27.591.896.815,00	27.745.896.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.042.316.253,00	214.033.545.892,00	-6.008.770.361,00
3	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	105.260.655.315,00	105.260.655.315,00	19.477.942.457,00	19.477.942.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	07	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	77.672.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.672.730.000,00	0,00	-77.672.730.000,00
3	07	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	2.626.132.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.132.332,00	0,00	-2.626.132.332,00
3	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0,00	0,00	36.108.357.773,00	36.108.357.773,00	24.584.134.909,00	24.584.134.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	0,00	0,00	9.667.800.000,00	9.671.142.000,00	332.200.000,00	332.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.003.342.000,00	3.342.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	196.167.807.747,00	267.702.080.136,00	274.124.679.621,00	290.928.496.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.292.487.368,00	558.630.576.141,00	88.338.088.773,00
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	0,00	105.260.655.315,00	105.260.655.315,00	19.477.942.457,00	19.477.942.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	07	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	0,00	3.157.652.095,00	28.187.648.340,00	18.796.559.478,00	19.246.559.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.954.211.573,00	47.434.207.818,00	25.479.996.245,00

5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.318.215.566.177,00	4.186.359.556.328,70	364.045.430.813,00	318.425.436.265,70	6.090.386.142,00	14.298.218.700,00	153.211.401.623,00	59.001.855.128,61	382.500.453.306,00	905.847.671.884,00	792.893.962.380,31	-112.953.709.503,69
5	02		KEUANGAN	4.318.215.566.177,00	305.834.139.028,00	305.834.139.028,00	305.834.139.028,00	3.609.407.200,00	3.609.407.200,00	153.211.401.623,00	153.211.401.623,00	382.500.453.306,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1 8.0003	UPT PENDAPATAN MULIA	0,00	0,00	951.805.000,00	951.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.805.000,00	951.805.000,00	0,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	974.117.349.241,00	1.223.367.690.718,00	926.429.156.104,00	900.623.403.741,00	0,00	0,00	0,00	1.900.546.505.345,00	2.123.991.094.459,00	223.444.589.114,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	0,00	551.849.527.371,00	551.849.527.371,00	321.219.334.616,00	321.219.334.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.0 1.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	523.050.199.771,00	701.587.357.480,00	311.969.334.616,00	106.575.838.996,00	0,00	0,00	0,00	835.019.534.387,00	808.163.196.476,00	-26.856.337.911,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	111.448.974.046,00	111.448.974.046,00	586.913.395.288,00	586.913.395.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.0.00.0 3.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0,00	0,00	110.622.259.046,00	133.786.778.423,00	586.913.395.288,00	765.127.694.409,00	0,00	0,00	0,00	697.535.654.334,00	898.914.472.832,00	201.378.818.498,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	196.167.807.747,00	267.702.080.136,00	274.124.679.621,00	290.928.496.005,00	0,00	0,00	0,00	470.292.487.368,00	558.630.576.141,00	88.338.088.773,00
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	0,00	551.849.527.371,00	551.849.527.371,00	321.219.334.616,00	321.219.334.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	1.01.2.22.0.00.0 1.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	28.799.327.600,00	38.835.529.600,00	9.250.000.000,00	9.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.049.327.600,00	48.085.529.600,00	10.036.202.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	0,00	192.450.419.438,00	186.287.649.077,00	27.591.896.815,00	27.745.896.815,00	0,00	0,00	0,00	220.042.316.253,00	214.033.545.892,00	-6.008.770.361,00
3	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	74.665.860.207,00	74.665.860.207,00	38.251.222.981,00	38.251.222.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09	2.09.3.27.3.25.0 7.0000	DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	15.825.329.022,00	15.868.141.002,00	25.334.346.815,00	25.334.346.815,00	0,00	0,00	0,00	41.159.675.837,00	41.202.487.817,00	42.811.980,00
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	0,00	0,00	123.463.638.540,00	136.943.590.191,00	6.311.003.242,00	7.481.495.442,00	0,00	0,00	0,00	129.774.641.782,00	144.425.085.633,00	14.650.443.851,00
9	02		KEKHUSUSAN PAPUA	0,00	0,00	123.463.638.540,00	123.463.638.540,00	6.311.003.242,00	6.311.003.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 02	9.02.0.00.0.00.2 2.0000	MAJELIS RAKYAT PAPUA	0,00	0,00	123.463.638.540,00	136.943.590.191,00	6.311.003.242,00	7.481.495.442,00	0,00	153.211.401.623,00	59.001.855.128,61	382.500.453.306,00	0,00	0,00	129.774.641.782,00	144.425.085.633,00	14.650.443.851,00
5		UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.318.215.566.177,00	4.186.359.556.328,70	364.045.430.813,00	318.425.436.265,70	6.090.386.142,00	14.298.218.700,00	153.211.401.623,00	59.001.855.128,61	401.168.452.286,00	382.500.453.306,00	0,00	0,00	905.847.671.884,00	792.893.962.380,31	-112.953.709.503,69
5 02		KEUANGAN	4.318.215.566.177,00	4.318.215.566.177,00	305.834.139.028,00	305.834.139.028,00	3.609.407.200,00	3.609.407.200,00	153.211.401.623,00	153.211.401.623,00	382.500.453.306,00	382.500.453.306,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5 02	5.02.0.00.0.00.1 8.0004	UPT PENDAPATAN TIMIKA	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.059.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.059.840.000,00	59.840.000,00
5 02	5.02.0.00.0.00.1 8.0001	UPT PENDAPATAN NABIRE	0,00	0,00	1.802.815.500,00	1.852.814.900,00	18.648.800,00	18.648.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.464.300,00	1.871.463.700,00	49.999.400,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0,00	0,00	192.450.419.438,00	186.287.649.077,00	27.591.896.815,00	27.745.896.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.042.316.253,00	214.033.545.892,00	-6.008.770.361,00
3 17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	46.002.594.024,00	46.002.594.024,00	861.938.400,00	861.938.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 17	2.17.3.31.3.30.1 2.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	6.050.564.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.564.100,00	0,00	-6.050.564.100,00
3 19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	0,00	34.601.602.726,00	34.601.602.726,00	288.279.000,00	288.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3 19	2.19.3.26.0.00.1 4.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PERWISATA	0,00	0,00	11.800.000.000,00	14.056.239.775,00	0,00	154.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000.000,00	14.210.239.775,00	2.410.239.775,00
8		UNSUB PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	117.931.977.793,00	195.347.055.671,00	123.220.000,00	123.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.055.197.793,00	195.470.275.671,00	77.415.077.878,00
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	117.931.977.793,00	117.931.977.793,00	123.220.000,00	123.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8 01	8.01.0.00.0.00.2 1.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	117.931.977.793,00	195.347.055.671,00	123.220.000,00	123.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.055.197.793,00	195.470.275.671,00	77.415.077.878,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	196.167.807.747,00	267.702.080.136,00	274.124.679.621,00	290.928.496.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.292.487.368,00	558.630.576.141,00	88.338.088.773,00
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	9.951.961.469,00	9.951.961.469,00	44.770.857.500,00	44.770.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2 16	2.16.2.21.2.20.1 1.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PERSANDIAN	0,00	0,00	500.000.000,00	115.015.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	115.015.900,00	-384.984.100,00

2	06	1.06.2.08.0.00.0 5.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	11.800.000.000, 00	7.500.002.900, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000.000, 00	7.500.002.900, 00	-4.299.997.100, 00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	9.951.961.469, 00	9.951.961.469, 00	44.770.857.500, 00	44.770.857.500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.2.20.1 1.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	0,00	0,00	9.349.985.469, 00	9.557.546.108, 00	41.986.357.500, 00	43.247.061.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.336.342.969, 00	52.804.607.108, 00	1.468.264.139, 00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	12.598.003.225, 00	12.598.003.225, 00	434.673.400, 00	434.673.400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.2.13.0.00.0 9.0000	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	0,00	0,00	10.098.003.225, 00	11.899.675.640, 00	434.673.400, 00	434.673.400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532.676.625, 00	12.334.349.040, 00	1.801.672.415, 00
			TOTAL	4.318.215.566.177, 00	4.186.359.556.328, 70	2.482.168.966.591, 00	2.949.799.619.420, 70	1.802.152.737.224, 00	1.391.939.711.530, 00	153.211.401.623, 00	59.001.855.128, 61	382.500.453.306, 00	401.168.452.286, 00	4.820.033.558.744, 00	4.801.909.638.365, 31	-18.123.920.378, 69

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002